

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI  
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DRAFT

## **Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

### **Pengantar:**

1. Sesuai dengan SEOJK No. /SEOJK.05/2017, form ini merupakan salah satu ketentuan mengenai Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
2. Pengisian form ini dilakukan oleh PMV dan PMVS;
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan form ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

### **Petunjuk Pengisian:**

1. Sebelum mengisi form, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat;
2. Pengisian form ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas kolom-kolom yang ada;
3. Isilah form dengan benar, hati-hati dan sesuai dengan kondisi sebenarnya PMV atau PMVS.

**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal disetujui dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Disetujui dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan masa jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.						
2.						
Dst.						

Data Perizinan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berkewarganegaraan Asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.						
2.						
Dst.						

-Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, Pendidikan, dan gelar profesi.

-Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, Pendidikan, dan gelar profesi.

-Biodata singkat DPS, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, Pendidikan, dan gelar profesi.

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.				
2.				
Dst.				

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS

-Uraian singkat-
------------------

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di PMV atau PMVS	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1			1		
			2		
			Dst		
2			1		
			2		
			Dst		
Dst					

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di PMV atau PMVS	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1			1		
			2		
			Dst		
2			1		
			2		
			Dst		
Dst					

c. DPS (jika ada)

No.	Nama	Posisi di PMV atau PMVS	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1			1		
			2		
			Dst		
2			1		
			2		
			Dst		
Dst					

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS dalam mencapai visi dan misi PMV atau PMVS

a. Direksi

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Tempat Penyelenggara
1.				
2.				
Dst				

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Tempat Penyelenggara
1.				
2.				
Dst				

c. DPS (jika ada)

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Tempat Penyelenggara
1.				
2.				
Dst				

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan/atau DPS

-Uraian singkat-
------------------

6. Pelaksanaan tugas komisaris independen (jika ada)

-Uraian singkat-
------------------

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan/atau rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
--

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Fisik	Sarana Media Elektronik		
1						
2						
Dst						

b. Rapat Dewan Komisaris

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
--

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Fisik	Sarana Media Elektronik		
1						
2						
Dst						

c. Rapat DPS (jika ada)

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
--

No	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Fisik	Sarana Media Elektronik		
1						
2						
Dst						

B. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal

-Uraian singkat-
------------------

2. Tugas dan tanggung jawab fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal

-Uraian singkat-
------------------

3. Program kerja fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan realisasinya

-Uraian singkat-
------------------

4. Struktur Komite Lainnya

No.	Komite	Struktur
1.		Ketua: Anggota:
2.		Ketua: Anggota:
Dst.		

5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

No.	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1.		
2.		
Dst.		

C. Penerapan Auditor Eksternal

Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan PMV atau PMVS terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan PMV atau PMVS dengan standar audit yang berlaku

-Uraian singkat-
------------------

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan PMV atau PMVS selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal

D. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS



-Uraian singkat contoh memastikan bahwa Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

-Uraian singkat-

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

-Uraian singkat-

4. Sistem informasi manajemen risiko

-Uraian singkat-

5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

-Uraian singkat-

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan

penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

-Uraian singkat-

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya

-Uraian singkat-

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang ditetapkan RUPS

-Uraian singkat-

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

-Uraian singkat-

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		
DPS	Jumlah DPS		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		

Keterangan:

\*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.

\*\*\*) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kebawah			

-Uraian singkat-

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- b. rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- c. rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah;
- d. rasio gaji anggota DPS yang tertinggi dan terendah; dan
- e. rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

-Uraian singkat-

F. Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PMV atau PMVS

-Uraian singkat contohnya: pengungkapan hasil rating PMV atau PMVS yang dilakukan oleh lembaga rating, transparansi tentang Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah yang disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promosi lainnya serta dalam website PMV atau PMVS, transparansi tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada Debitur, dan pembelian kembali saham (*shares buy back*).-

G. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

- 1. Pengunduran diri atau pemberhentian komisaris independen, auditor eksternal, dan/atau DPS (jika ada)

-Uraian singkat-

2. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.			
2.			
Dst.			

3. Tenaga Kerja Asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.							
2.							
Dst.							

4. Transaksi material dengan pihak terkait

-Uraian singkat-
------------------

5. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset PMV atau PMVS oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai PMV atau PMVS.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.					
2.					
Dst.					

Keterangan:

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

-Uraian singkat terkait benturan kepentingan-
---

6. Laporan pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud*

a. Inventarisasi kejadian *fraud* dan tindak lanjut

Jenis Fraud 1)	Tanggal Terjadinya <i>Fraud</i>	Divisi/ Bagian Terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak yang terlibat 2)	Jabatan	Kerugian dalam Rupiah 3)	Tindakan Perusahaan 4)	Kelemahan/ Penyebab Terjadinya <i>Fraud</i> 5)	Tindak Lanjut/ Perbaikan 6)	Kronologis Kejadian <i>Fraud</i>

b. Perkembangan pelaksanaan penerapan strategi anti-*fraud* 7)

1) Pencegahan:

.....  
.....

2) Deteksi:

.....  
.....

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:

.....  
.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:

.....  
.....

Penjelasan:

- 1) Jenis *fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan, atau lainnya.
- 2) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- 3) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- 4) Tindakan PMV atau PMVS merupakan respon PMV atau PMVS atas kejadian *fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- 5) Kelemahan/penyebab terjadinya *fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada PMV atau PMVS yang menimbulkan *fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari PMV atau PMVS.
- 6) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan PMV atau PMVS terkait kelemahan yang menimbulkan *fraud*.
- 7) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *fraud* pada periode laporan.

#### 7. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap		
a.		
b.		
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata		

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
a.		
b.		
Total		

8. Etika Bisnis PMV atau PMVS

-Uraian singkat terkait nilai etika bisnis PMV atau PMVS yang menjadi panduan bagi organ PMV atau PMVS dan seluruh karyawan-

9. Informasi material lain mengenai PMV atau PMVS yang terkait dengan pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada PMV atau PMVS

-Uraian singkat-

Menyetujui,

DIREKSI

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN

RISWINANDI